



RAPBD DKI 2015 Disahkan Februari

SATU persatu tahapan proses penge-sahaan Rancangan Anggaran Penda-patan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 dilalui. Setelah kelar menuntaskan pembahasan KUA-PPAS, kemarin (12/1) pihak eksekutif dan legislatif menggelar rapat paripurna penyampaian RAPBD 2015.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI optimis pengesahan RAPBD dilakukan pertengahan Februari 2015.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Märsudi mengatakan pihaknya telah menentukan jadwal pembahasan RAPBD DKI 2015 yang mulai digelar kemarin (12/1), dengan rapat paripurna perdana hi Februari dengan menggelar rapa-purna terakhir untuk pengesahan DKI 2015 ■

"Pokoknya Februari sudah tuntas semuanya. Kita sudah jadwalkan pada 16 Februari mendatang, RAPBD DKI 2015 disahkan," terangnya, kemarin (12/1).

Dipaparkannya juga, rapat pa-ri-purna akan digelar sebanyak empat kali. Yakni, rapat paripur-na perdana, kemarin (12/1) de-ngan agenda penyampaian pi-dato Gubernur DKI mengenai RAPBD DKI 2015.

Kedua, rapat paripurna pada Rabu (14/1) dengan agenda pe-nyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD DKI. Ketiga, rapat pa-ri-purna ketiga yang akan digelar Jumat (16/1) dengan agenda penyampaian jawaban guber-nur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi.

Lalu rapat paripurna terakhir yang akan digelar Senin (16/2) dengan agenda pengesahan RAPBD DKI 2015 menjadi Perda DKI 2015. "Antara rapat paripurna ketiga dan keempat memang ren-tang waktunya agak panjang. Karena setelah rapat paripurna ketiga, kami akan kontinyu mem-bahas APBD di komisi, Badan Anggaran (Banggar) dan fraksi," papar juga politisi PDIP itu.

Pembahasan RAPBD DKI 2015

di tingkat komisi, lanjutnya, mulai efektif dilakukan pada 19-22 Januari. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat internal Banggar pada 23 Ja-nuari. Lalu rapat Banggar deng-an Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) DKI pada 26-27 Januari mendatang.

Setelah itu, akan digelar rapat gabungan Pimpinan DPRD DKI pada 28 Januari. Kemudian di-lanjutkan dengan pembahasan RAPBD DKI 2015 ditingkat fraksi-fraksi pada 29 Januari. Hasil pembahasan anggaran di tingkat fraksi akan dibawa da-lam rapat gabungan pimpinan DPRD kedua yang digelar 30 Januari nanti.

"Lalu mulai 3-13 Februari, TPAD bersama BPKD melaku-kan penyusunan kode rekening kegiatan dalam RAPBD DKI 2015. Setelah itu selesai, baru APBD DKI dapat kita sahkan pada 16 Februari," ungkapny-a juga. Pras-sapaan Prasetio, juga mengaku optimis, APBD DKI akan dapat disahkan sesuai jad-wal yang ditentukan.

Sehingga tidak akan menda-patkan sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ka-rena terlambat mengesahkan APBD DKI 2015. Sebab, APBD akan disahkan sebelum tenggat waktu diberikan. Diungkapkanya juga, Pemprov dan DPRD DKI telah sepakat besaran APBD DKI 2015 sekitar Rp 73 triliun.

Jumlah itu turun dibanding-kan yang diajukan sebelumnya oleh eksekutif mencapai Rp 77 triliun. Penurunan ini dikarena-kan sisa lebih penggunaan ang-gran 2014 yang awalnya Rp 18 triliun setelah dikurangi men-jadi Rp 8 triliun. Selain itu, pe-nurunan juga terjadi karena dana penyertaan modal pemer-intah (PMP) menjadi Rp 6,6 triliun dari yang direncanakan Rp 11,3 triliun.

Alokasi anggaran Rp 6,6 trili-un, hanya diberikan kepada

dua BUMD DKI. Yaitu, PT MRT Jakarta dan PT Transjakarta. "Dua BUMD tersebut layak di-berikan PMP. Mereka kan akan membangun MRT dan mem-beli bus untuk rakyat. Yang en-am BUMD lainnya nanti saja-lah," paparnya juga.

Sekedar diketahui, setelah *me-morandum of understanding* (MoU) mengenai Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon APBD Sementara (KUA-PPAS) 2015 dengan nilai Rp 73 triliun ditandatangani eksekutif dan legislatif pada Kamis (8/1), DPRD DKI mulai menyusun jad-wal rapat paripurna untuk mem-bahas Raperda APBD DKI 2015.

Pras juga mengatakan rapat pa-ri-purna perdana yang digelar ke-marin (12/1) tentang pidato Gubernur DKI Jakarta mengenai penyampaian RAPBD DKI 2015. Sedangkan Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan fokus anggaran RAPBD DKI 2015 adalah bidang pekerjaan umum (PU) dan pemberian penyertaan modal pemerintah (PMP). "Lebih banyak anggaran untuk PU dan PMP," ujarnya. (pes)